

## **Penguatan Ketahanan Ekonomi**

Ketahanan Ekonomi adalah kondisi dinamik kehidupan perekonomian bangsa yang berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan dalam mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi serta mengatasi segala ancaman, rintangan, gangguan, hambatan serta tantangan yang berasal dari luar negeri dan dari dalam negeri secara langsung maupun tidak langsung untuk menjamin kelangsungan hidup perekonomian bangsa dan negara Republik Indonesia yang berdasarkan kepada Pancasila dan UUD 1945.

Jika ditinjau dalam konteks makro, ketahanan ekonomi dapat didefinisikan sebagai kemampuan suatu negara dalam menjaga kestabilan pertumbuhan ekonomi serta memelihara kelangsungan standar hidup bagi seluruh penduduknya melalui pembangunan ekonomi yang berkualitas dengan tetap memelihara kemadirian ekonomi.

Kestabilan pertumbuhan ekonomi sangat ditentukan oleh kestabilan capaian PDB (Produk Domestik Bruto) dari tahun ke tahun. PDB merupakan agregat dari belanja Pemerintah, Investasi, konsumsi swasta serta selisih antara ekspor dan impor secara nasional maupun regional daerah.

Pentingnya aspek Kemandirian ekonomi untuk menjaga kestabilan ekonomi. Kemandirian ekonomi dapat diartikan sebagai kemampuan ekonomi suatu negara/daerah untuk tetap tumbuh stabil, dengan seminimal mungkin bergantung pada perekonomian global atau di luar dari negaranya. Negara yang perekonomiannya mandiri bisa bertahan bahkan manakala sbegaian besar negara lain mengalami kegoncangan perekonomian.

Pondasi utama dalam mencapai kemandirian ekonomi nasional adalah konsumsi publik yang ditentukan oleh daya beli masyarakat. Daya beli masyarakat sangat dipengaruhi oleh ketimpangan pembangunan ekonomi antar wilayah dan tingkat kemiskinan wilayah.

Gambaran mengenai kemampuan konsumsi masyarakat (publik) dapat dicermati melalui angka kemiskinan di wilayah tersebut. Kemiskinan dianggap sebagai indikator kemampuan konsumsi masyarakat sebab kemiskinan dapat diartikan sebagai ketidakmampuan seseorang untuk mencapai standar hidup yang layak.

Selain itu, pertumbuhan ekonomi juga ditopang oleh sektor ekonomi yang menyerap tenaga kerja sehingga menyebabkan berkurangnya angka kemiskinan dan laju pengangguran.

Pemerintah Provinsi merupakan bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang memiliki wewenang untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat, melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, peningkatan daya saing daerah, serta pemberdayaan masyarakat.

Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi harus secara terus menjaga dan memelihara ketahanan ekonomi daerahnya sehingga dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang holistik di Indonesia.

Dalam nomenklatur organisasi Pemerintah Daerah, maka pelaksanaan koordinasi dan pemantauan pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, dan penanganan konflik sosial ekonomi di wilayah provinsi merupakan tugas dan kewenangan OPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

## Penguatan ekonomi di Sulsel

Pemeliharaan ketahanan ekonomi dan pangan merupakan bagian dari upaya Pemerintah untuk menuju kesejahteraan masyarakat. Komitmen membangun Ketahanan pangan sudah sejak dulu dideklarasikan dan telah menjadi bagian dalam prioritas pembangunan nasional, mulai dari pemerintah pertama hingga pemerintahan sekarang. Sebagai bukti keseriusan Pemerintah sekarang (Presiden Joko Widodo) terhadap ketahanan pangan adalah mewujudkan kedaulatan pangan yang tertuang dalam agenda 7 Nawa Cita sebagai agenda prioritas Kabinet Kerja, yaitu mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.

Ketahanan Pangan merupakan salah satu prioritas utama dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 yang difokuskan pada peningkatan ketersediaan pangan, pemantapan distribusi pangan, percepatan penganeekaragaman pangan, dan pengawasan keamanan pangan segar. Disisi lain pembangunan ketahanan pangan dilaksanakan sebagai upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan penurunan kemiskinan sebagai perwujudan pembangunan sosial, budaya, dan ekonomi sebagai bagian pembangunan secara keseluruhan.

Penjabaran terhadap Nawa cita ketujuh dari RPJMN 2015-2019 yaitu Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik **tertuang dalam Misi Kedua dari RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan yaitu Meningkatkan kualitas kemakmuran ekonomi, kesejahteraan sosial dan kelestarian lingkungan dengan harapan agar dapat meningkatkan:**

- 1) Produktivitas dan produksi perekonomian;
- 2) Peningkatan dan pemerataan pendapatan;
- 3) Penurunan angka kemiskinan dan pengangguran;
- 4) Akselerasi pembangunan pertanian, perikanan dan kehutanan;
- 5) Pengembangan industri, pengembangan wirausaha lokal;
- 6) Pembangunan pariwisata,
- 7) Penanganan masalah kesejahteraan sosial;
- 8) Pelestarian lingkungan dan sumberdaya alam.

Oleh karena itu, penguatan terhadap pembangunan daerah 2013-2018 diarahkan pada kebijakan dengan memprioritaskan:

- 1) Pemantapan kehidupan beragama
- 2) Peningkatan produksi pangan dan penguatan ketahanan pangan termasuk pengembangan pangan hutan dan laut
- 3) Pengembangan ekonomi kerakyatan
- 4) Pembinaan dan pengentasan masyarakat tidak mampu
- 5) Peningkatan kelestarian dan penanganan dampak lingkungan
- 6) Pembangunan bidang pendidikan, kepemudaan, keolahragaan dan kebudayaan
- 7) Penguatan poros Maritim
- 8) Pembangunan bidang kesehatan
- 9) Pengembangan kawasan strategis
- 10) Peningkatan kapasitas infrastruktur wilayah
- 11) Pengelolaan Sumber Daya Air dan peningkatan kapasitas infrastruktur irigasi
- 12) Pengembangan kerjasama dan daya saing daerah
- 13) Pemeliharaan ketertiban dan demokrasi
- 14) Reformasi birokrasi dan penguatan kapasitas kelembagaan
- 15) Pemberdayaan masyarakat dan penguatan kemandirian desa

Kebijakan ini tidak berdiri sendiri tetapi menjadi satu kesatuan untuk mencapai visi dan misi Provinsi Sulawesi Selatan serta untuk mendorong dan memacu produktivitas

dan produksi perekonomian di Sulawesi Selatan untuk memperkuat ketahanan ekonomi di Provinsi Sulawesi Selatan ini yang dijabarkan pada beberapa program yang terkait satu sama lain dalam berbagai urusan pemerintahan daerah.

Upaya-upaya menuju kemakmuran ekonomi masyarakat akan menimbulkan berbagai geliat dan dinamika pembangunan ekonomi yang memiliki dampak bagi masyarakat. Dengan adanya pengemabngan kerjasama antar daerah, pembangunan infrastruktur, investasi asing atau pemodal besar, dan lingkungan hidup jika tidak darahkan melalui regulasi yang memadai. Maka fungsi dan peran OPD Kesbangpol sebagai perangkat daerah yang mempunyai tugas untuk melakukan pengendalian sosial terhadap permasalahan ekonomi daerah khususnya dalam ketersediaan pangan daerah.

Oleh karena itu, melalui itu melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulsel melakukan tugas: **Memantau Stabilitas Ketersediaan bahan pokok masyarakat dan melakukan Dialog dengan Lembaga Usaha Ekonomi Kecil.**

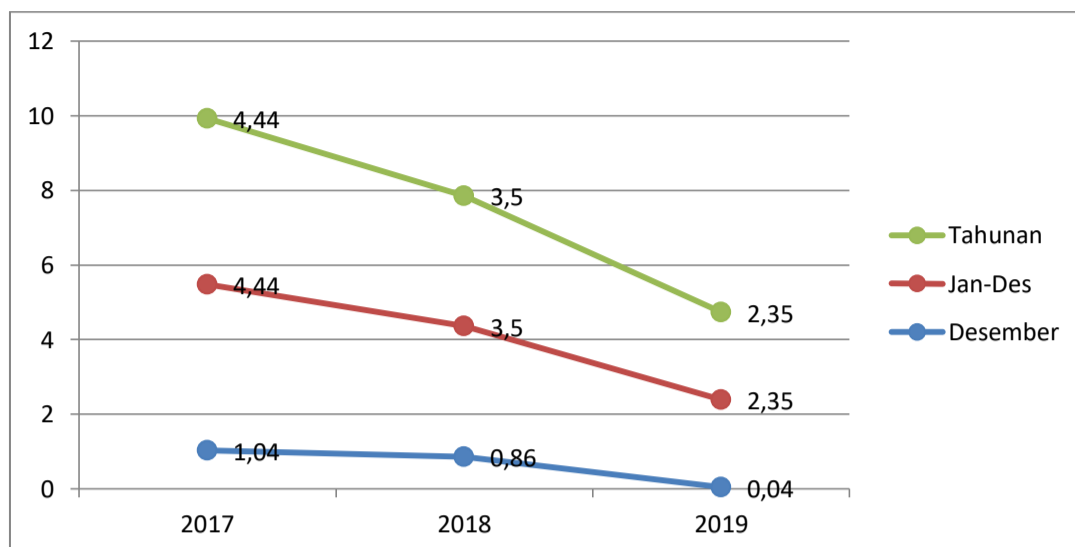
Pemantauan terhadap stabilitas ketersediaan bahan pokok masyarakat ditinjau dari inflasi dan deflasi serta pantauan terhadap harga-harga bahan pokok masyarakat dan gambaran umum makro ekonomi daerah Sulawesi Selatan. Sementara itu Dialog dengan Lembaga Usaha Ekonomi kecil sebagai potret dukungan pemberdayaan masyarakat sekaligus memantau kemampuan Lembaga Usaha tersebut untuk dapat mengembangkan usahanya ditengah-tengah tantangan pasar bebas dan kemajuan revolusi industri 4.0. sehingga Pemerintah Provinsi dapat mengintensifkan informasi dan kreativitas dengan menciptakan ide dan gagasan yang bisa dikembangkan guna meningkatkan perekonomian.

### **Capaian Penguatan Ekonomi Sulsel**

Untuk mengukur Capaian ketahanan ekonomi daerah ditinjau dari sisi makro dapat ditunjukkan dari kestabilan harga melalui inflasi/Deflasi daerah; tingkat ketimpangan daerah (Gini Ratio) dan Tingkat Kemiskinan penduduk.

Capaian inflasi Sulawesi Selatan menunjukkan bahwa Provinsi Sulawesi Selatan dapat menekan laju inflasi daerah sampai pada angka 2,35 persen. Telah terjadi penurunan yang signifikan sepanjang dua tahun terakhir, dimana pada tahun 2017 angka inflasi Sulawesi Selatan mencapai angka tertinggi 4,44 % lalu mengalami penurunan pada tahun 2018 yaitu 3,50 %. Capaian ini memberi respon positif terhadap pemeliharaan kondisi kestabilan perekonomian daerah (diagram 1)

Diagram 1  
Tingkat Inflasi Bulanan, Tahun kalender dan tahun ke Tahun  
Desember 2017-2019 (Persen)



Sumber data: BPS Prov. Sulsel 2020

Sepanjang tahun 2019 kelompok yang memberikan sumbangan positif terhadap laju inflasi Sulawesi Selatan bahan makanan; makanan jadi, minuman rokok dan tembakau serta kelompok sandang. Laju tertinggi pada bahan makanan mencapai 4,98 % (Juni), sementara untuk kelompok makanan jadi, minuman roko dan tembakau mencapai angka 3,46 % (Nov). Pada kelompok sandang, laju tertinggi mencapai 5,94 % (September). Namun upaya dari TPID Sulsel dapat menekan laju inflasi sehingga inflasi tahunan hanya mencapai 2,35 %.

Tabel 1  
Inflasi Bulanan, Laju Inflasi, Inflasi tahun ke Tahun 2019  
Dalam Persen

No	Kelompok Pengeluaran	Inflasi Bulan											
		Jan	Feb	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agt	Sep	Okt	Nov	Des
	Umum	0,53	-0,19	0,22	0,42	0,76	0,20	-0,05	0,36	-0,15	0,07	0,11	0,04
1.	Bahan makanan	1,80	-1,00	-0,36	1,51	2,43	0,56	-0,73	0,72	-1,02	0,41	0,29	-0,41
2.	Makanan jadi, minuman rokok & tembakau	0,20	0,49	0,33	0,19	0,59	0,75	0,28	0,04	0,23	0,11	0,19	0,14
3.	Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar	0,19	0,26	0,20	-0,02	0,11	0,18	0,04	0,09	0,04	0,09	0,18	0,08
4.	Sandang	0,23	0,11	0,50	0,18	1,63	0,69	1,25	0,72	0,50	-0,29	0,10	0,13
5.	Kesehatan	0,11	0,03	0,83	0,10	0,07	0,13	0,19	-0,14	0,44	0,12	0,14	0,51
6.	Pendidikan, Rekreasi, dan Olahraga	0,10	0,09	0,10	0,05	-0,02	0,03	0,54	1,54	0,01	0,00	-0,03	0,01
7.	Transpor, Komunikasi dan Jasa Keuangan	-0,04	-0,43	0,75	0,02	-0,49	-0,91	-0,27	0,06	0,02	-0,27	-0,32	0,41

No	Kelompok Pengeluaran	Laju Inflasi											
		Jan	Feb	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agt	Sep	Okt	Nov	Des
	Umum	0,53	0,35	0,56	0,99	1,76	1,96	1,92	2,28	2,13	2,20	2,31	2,35
1.	Bahan makanan	1,80	0,78	0,41	1,93	4,40	4,98	4,21	4,96	3,89	4,32	4,62	4,19
2.	Makanan jadi, minuman rokok & tembakau	0,20	0,69	1,03	1,22	1,81	2,58	2,87	2,91	3,15	3,26	3,46	3,60
3.	Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar	0,19	0,45	0,65	0,63	0,74	0,91	0,96	1,04	1,08	1,16	1,36	1,44
4.	Sandang	0,23	0,34	0,84	1,03	2,67	3,37	4,66	5,42	5,94	5,64	5,74	5,87
5.	Kesehatan	0,11	0,14	0,97	1,06	1,13	1,26	1,45	-0,14	1,76	1,88	2,02	2,54
6.	Pendidikan, Rekreasi, dan Olahraga	0,10	0,19	0,30	0,34	0,32	0,34	0,89	1,54	2,45	2,45	2,42	2,43
7.	Transpor, Komunikasi dan Jasa Keuangan	-0,04	-0,47	0,28	0,30	-0,19	-1,10	-1,36	0,06	-1,29	-1,55	-1,87	-1,46
No	Kelompok Pengeluaran	Inflasi tahun ke tahun											
		Jan	Feb	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agt	Sep	Oct	Nov	Des
	Umum	3,22	2,79	3,08	3,33	3,74	2,98	2,37	2,84	3,57	3,36	3,19	2,35
1.	Bahan makanan	4,32	2,49	2,16	3,15	5,03	3,85	1,30	3,03	5,21	5,99	6,34	4,19
2.	Makanan jadi, minuman rokok & tembakau	3,12	3,24	3,47	3,49	3,94	3,62	1,44	3,31	3,44	3,46	3,59	3,60
3.	Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar	1,33	1,55	1,75	1,63	1,66	1,60	1,58	1,50	1,47	1,46	1,49	1,44
4.	Sandang	1,85	2,04	2,68	2,93	4,79	3,48	5,33	6,30	6,66	5,67	5,60	5,87
5.	Kesehatan	2,64	2,58	3,17	2,88	2,78	2,51	2,60	2,26	2,65	2,31	2,15	2,54
6.	Pendidikan, Rekreasi, dan Olahraga	1,36	1,35	1,38	1,40	1,27	1,01	1,38	2,81	2,79	2,60	2,47	2,43
7.	Transpor, Komunikasi dan Jasa Keuangan	5,64	5,41	6,61	6,72	5,21	3,68	3,17	2,72	3,49	1,88	0,37	-1,46

Sumber data: BPS Prov. Sulsel 2020

Selain itu pula deflasi, juga terjadi di Sulawesi Selatan pada sepanjang tahun 2019 yakni pada bulan Februari, Juli dan September. Deflasi terjadi, karena turunnya harga pada beberapa kelompok pengeluaran.

Demikian pula pada beberapa Kota Kabupaten yang ada di Sulawesi Selatan. Dari 5 Kabupaten/Kota penyumbang inflasi di Sulawesi Selatan, semua daerah memberikan kontribusi positif dalam menahan laju inflasi. Inflasi tertinggi pada tahun 2019 hanya pada kota parepare dengan capaian 2,45 %. Sementara inflasi terendah pada Kota Watampone yang hanya mencapai 1,64 %.

Tabel 2

Tingkat Inflasi Sulawesi Selatan menurut Kota di Sulawesi Selatan (%)

Tahun Kalender	Bulukumba		Watampone		Makassar		Parepare		Palopo	
	Laju	Tahun	Laju	Tahun	Laju	Tahun	Laju	Tahun	Laju	Tahun
Januari	0,90	3,43	0,09	3,46	0,54	3,35	1,14	1,73	0,34	2,94
Februari	0,69	2,74	-0,51	2,44	0,43	3,03	0,36	0,88	-0,10	2,20
Maret	0,52	2,58	-0,79	2,30	0,72	3,30	0,50	2,00	-0,05	2,39
April	0,85	2,52	-0,40	2,52	1,17	3,56	0,54	2,38	0,45	2,57
Mei	1,76	3,03	0,32	2,51	1,91	3,97	1,90	3,12	0,99	2,93
Juni	1,84	2,50	0,99	1,85	3,08	3,08	2,98	3,53	1,86	2,35
Juli	1,77	1,91	0,84	0,80	1,97	2,60	2,49	1,99	1,73	1,48
Agustus	2,05	2,32	1,57	1,55	2,37	3,11	2,53	1,99	1,71	1,75
September	2,00	2,65	1,57	2,06	2,25	3,87	1,66	2,76	1,72	2,46
Oktober	1,98	2,81	1,36	1,83	2,35	3,61	1,69	2,58	1,71	2,68
November	2,07	2,48	1,63	1,84	2,38	3,34	2,55	3,54	1,86	2,55
Desember	2,25	2,25	1,64	1,64	2,43	2,43	2,45	2,45	1,91	1,91

Sumber data: BPS Prov. Sulsel 2019-2020

Sementara itu, Gini Ratio yang merupakan alat ukur ketimpangan pendapatan masyarakat, dengan ilai berkisar anatar 0-1. Semakin tinggi nilai Gini Ratio menunjukkan ketimpangan yang semakin tinggi pula. Gini Ratio Sulawesi Selatan mengamali penurunan sejak rentang Tahun 2015 hingga 2019. Pada tahun 2015 Gini Ratio Sulawesi Selatan pada angka 0,404, menurun hingga menjadi 0,391 di tahun 2019 atau dengan kategori tingkat ketimpangan rendah (Tabel 3).

Nilai Koefisien	Distribusi Pendapatan
<0.4	Tingkat ketimpangan rendah
0,4-0,5	Tingkat ketimpangan sedang
>0,5	Tingkat ketimpangan tinggi

Tabel 3

Gini Ratio Sulawesi Selatan 2015-2019

No	Tahun	Jumlah koefisien
1	Maret 2015	0,424
2	September 2015	0,404
3	Maret 2016	0,426
4	September 2016	0,400
5	Maret 2017	0,407
6	September 2017	0,429
7	Maret 2018	0,397
8	September 2018	0,388
9	Maret 2019	0,389
10	September 2019	0,391

Sumber data: BPS Prov. Sulsel 2020

Perkembangan Tingkat Kemiskinan atau penduduk miskin di Sulawesi Selatan juga mengalami penurunan sepanjang tahun 4 tahun terakhir. Dari tahun 2015 hingga tahun 2019 terjadi penurun penduduk miskin yang signifikan dari 9,5 % menurun menjadi 8,56 %. Secara abslout penurunan penduduk miskin ini memberikan gambaran meningkatnya kesejahteraan masyarakat dan memili hubungan linear yang sangat signifikan dengan membaiknya ketimpangan pendapatan masyarakat (Tabel 4)

Tabel 4

Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Sulawesi Selatan 2015-2019

Dalam Ribu (000)

No	Tahun	Jumlah	Persentase
1	Maret 2015	797,72	9,39
2	September 2015	864,51	10,12
3	Maret 2016	807,03	9,40
4	September 2016	796,81	9,24
5	Maret 2017	813,07	9,38
6	September 2017	825,97	9,48
7	Maret 2018	792,63	9,06
8	September 2018	779,64	8,87
9	Maret 2019	767,80	8,69
10	September 2019	759,58	8,56

Sumber data: BPS Prov. Sulsel 2020